

## ABSTRAK

**Sutri Undari.** 2019. *Sikap Kepala KUA Terhadap Permohonan Kehendak Nikah Bagi Pasangan Yang Telah Mengucapkan Talak dan Rujuk Berulang-ulang Di luar Persidangan.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj Nadiyah, M.H. (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H.

**Kata Kunci:** Sikap, Talak Berulang-ulang, Diluar Persidangan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suami istri yang sudah bercerai berulang-ulang diluar persidangan, kemudian ingin menikah lagi secara resmi di KUA untuk di catatkan kembali pernikahannya. Berdasarkan kasus ini penulis meminta Kepala KUA untuk menyikapi kehendak nikah pasangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap kepala KUA terhadap kehendak nikah bagi pasangan yang telah mengucapkan talak berulang-ulang diluar persidangan dan upaya yang diberikan kepala KUA terhadap pasangan yang telah mengucapkan talak berulang-ulang diluar persidangan tersebut.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan model yuridis sosiologis yang mempunyai objek kajian mengenai sikap Kepala KUA yang berlokasi di KUA Banjarmasin Tengah, KUA Gambut, KUA Tamban dan KUA Mekarsari. Peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan observasi, kemudian diolah menggunakan teknik editing, kategorisasi dan interpretasi. Setelah memperoleh kesimpulan, peneliti melakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang di dapat.

Peneliti menemukan adanya sikap kepala KUA yang berbeda dalam menyikapi permohonan kehendak nikah pasangan yang telah mengucapkan talak dan rujuk berulang-ulang di luar persidangan. Analisis yang dilakukan penulis terhadap temuan ini adalah semua Kepala KUA sepakat menolak permohonan kehendak nikahnya tetapi disisi lain, semua Kepala KUA juga sepakat bahwa dalam diri pribadi mereka mengakui perceraian mereka. Perihal pengakuan dari Kepala KUA membuat peneliti janggal akan hukum yang mereka terapkan. Menurut peneliti, sebagai Kepala KUA yang lebih mengetahui hukum, harus bersifat loyal terhadap Pemerintah atas jabatan yang mereka miliki dengan tidak menduakan hukum yang berlaku di Indonesia.